

Judul : Setya Akan Diperiksa sebagai Tersangka
Tanggal : Jumat, 28 Juli 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 8

JUMAT, 28 JULI 2017 | KORAN TEMPO

8

Setya Akan Diperiksa sebagai Tersangka

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa Ketua Umum Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik. Penyidik akan memeriksa Ketua Umum Partai Golkar ini ihwal dugaan penyalahgunaan kewenangannya sebagai anggota DPR selama proses penganggaran proyek senilai Rp 5,9 triliun itu. "Nanti akan diumumkan lebih detail jadwal pemeriksaan tersangka dan para saksinya," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, kemarin.

KPK memang telah menjadwalkan pemeriksaan perdana Setya sebagai tersangka pada pekan ini. Sejak awal pekan lalu, penyidik baru memeriksa sejumlah saksi dari pengusaha swasta dan staf Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, penyidik memeriksa dua terpidana kasus KTP elektronik, yaitu Irman dan Sugiharto; serta tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Sejumlah pengusaha yang tercatat sebagai saksi adalah adik kandung Andi Narogong, Vidi Gunawan, yang tercatat menyediakan duit untuk menyuap anggota Komisi Pemerintahan DPR. Mantan staf Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemdagri, Yosef Sumartono, yang tercatat mengantar duit dari Vidi, juga menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

Nama lain yang masuk daftar adalah Made Oka Masagung, Muda Ikhsan Harahap, Andhika Mohammad Yudisthira Monoarfa, Frans Hartono Arief, dan Rabin Imam

Soetojo. "Penyidik sekarang sudah melakukan pengembangan lebih jauh dari kasus KTP elektronik. Kami mendalami lebih detail tentang aliran dan asal uang yang kemudian dibagi-bagi ke sejumlah nama terkait penganggaran proyek ini," kata Febri.

KPK juga mengajukan pencekalan atas keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi, pada awal penyidikan ini. Dalam persidangan, nama Irvanto muncul sebagai Direktur

KPK juga mengajukan pencekalan atas keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi, pada awal penyidikan ini.

PT Murakabi Sejahtera, yang menjadi salah satu konsorsium dalam tender proyek KTP elektronik. Namanya juga muncul saat jaksa KPK menanyakan perihal keberadaan perusahaan kongsi Setya dan Andi. "Seluruh langkah-langkah yang dilakukan KPK terkait penanganan kasus KTP elektronik didasarkan pada petunjuk dan bukti yang cukup," ujar Febri.

Kuasa hukum Setya, Firman Wijaya, mengatakan kliennya akan mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus ini. Ia menyatakan sejumlah pertimbangan KPK dalam penetapan status tersangka tak cermat. "Saya melihatnya sementara *legal premature*," kata Firman.

● FRANSISCO ROSARIANS

IKLAN